



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pengawasan obat dan makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diubah;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 610);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Jumlah UPT BPOM terdiri atas:
    - a. 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM;
    - b. 30 (tiga puluh) Balai POM; dan
    - c. 23 (dua puluh tiga) Loka POM.
  - (2) Provinsi, nomenklatur, klasifikasi, kedudukan, dan wilayah kerja UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

☐

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PROVINSI, NOMENKLATUR, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	Aceh	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang
2	Aceh	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Loka	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Nagan Raya
3	Aceh	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Loka	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Simeulue
4	Sumatera Utara	Balai Besar POM di Medan	Balai Besar	Kota Medan	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli,

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
					Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Simalungun
5	Sumatera Utara	Balai POM di Tanjungbalai	Balai	Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara
6	Sumatera Utara	Loka POM di Kabupaten Toba	Loka	Kabupaten Toba	Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga
7	Sumatera Barat	Balai Besar POM di Padang	Balai Besar	Kota Padang	Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok
8	Sumatera Barat	Balai POM di Payakumbuh	Balai	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar
9	Sumatera Barat	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	Loka	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawah Lunto
10	Riau	Balai Besar POM di Pekanbaru	Balai Besar	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti
11	Riau	Balai POM di Dumai	Balai	Kota Dumai	Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir
12	Riau	Balai POM di Indragiri Hulu	Balai	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi
13	Jambi	Balai POM di Jambi	Balai	Kota Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
					Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
14	Jambi	Loka POM di Kabupaten Bungo	Loka	Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin
15	Bengkulu	Balai POM di Bengkulu	Balai	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Tengah
16	Bengkulu	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Loka	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong
17	Sumatera Selatan	Balai Besar POM di Palembang	Balai Besar	Kota Palembang	Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Prabumulih
18	Sumatera Selatan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka	Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam
19	Lampung	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Balai Besar	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat
20	Lampung	Balai POM di Tulang Bawang	Balai	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
21	Kepulauan Bangka Belitung	Balai POM di Pangkal Pinang	Balai	Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah
22	Kepulauan Bangka Belitung	Loka POM di Kabupaten Belitung	Loka	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur
23	Banten	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar	Kota Serang	Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang
24	Banten	Balai POM di Tangerang	Balai	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
25	Daerah Khusus Jakarta	Balai Besar POM di Jakarta	Balai Besar	Kota Jakarta	Kota Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Utara
26	Jawa Barat	Balai Besar POM di Bandung	Balai Besar	Kota Bandung	Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan
27	Jawa Barat	Balai POM di Tasikmalaya	Balai	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar
28	Jawa Barat	Balai POM di Bogor	Balai	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok
29	Jawa Tengah	Balai Besar POM di Semarang	Balai Besar	Kota Semarang	Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
					Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemasang
30	Jawa Tengah	Balai POM di Banyumas	Balai	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga
31	Jawa Tengah	Balai POM di Surakarta	Balai	Kota Surakarta	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri
32	Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Besar POM di Yogyakarta	Balai Besar	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman
33	Jawa Timur	Balai Besar POM di Surabaya	Balai Besar	Kota Surabaya	Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo
34	Jawa Timur	Balai POM di Kediri	Balai	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung
35	Jawa Timur	Balai POM di Jember	Balai	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Lumajang

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
36	Bali	Balai Besar POM di Denpasar	Balai Besar	Kota Denpasar	Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung
37	Bali	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Loka	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana
38	Nusa Tenggara Barat	Balai Besar POM di Mataram	Balai Besar	Kota Mataram	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara
39	Nusa Tenggara Barat	Balai POM di Bima	Balai	Kabupaten Bima	Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat
40	Nusa Tenggara Timur	Balai Besar POM di Kupang	Balai Besar	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Sikka
41	Nusa Tenggara Timur	Balai POM di Ende	Balai	Kabupaten Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada
42	Nusa Tenggara Timur	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Loka	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur
43	Nusa Tenggara Timur	Loka POM di Kabupaten Belu	Loka	Kabupaten Belu	Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka
44	Nusa Tenggara Timur	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Loka	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah
45	Kepulauan Riau	Balai POM di Batam	Balai	Kota Batam	Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
46	Kepulauan Riau	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	Loka	Kota Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan
47	Kalimantan Barat	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar	Kota Pontianak	Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kayong Utara
48	Kalimantan Barat	Balai POM di Sanggau	Balai	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi
49	Kalimantan Barat	Loka POM di Kabupaten Sambas	Loka	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang
50	Kalimantan Tengah	Balai Besar POM di Palangka Raya	Balai Besar	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur
51	Kalimantan Tengah	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Loka	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara
52	Kalimantan Selatan	Balai Besar POM di Banjarbaru	Balai Besar	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
53	Kalimantan Selatan	Balai POM di Tabalong	Balai	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
54	Kalimantan Selatan	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Loka	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru
55	Kalimantan Timur	Balai Besar POM di Samarinda	Balai Besar	Kota Samarinda	Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
					Kutai Barat, Kota Bontang, dan Kabupaten Mahakam Ulu
56	Kalimantan Timur	Balai POM di Balikpapan	Balai	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajem Paser Utara
57	Kalimantan Utara	Balai POM di Tarakan	Balai	Kota Tarakan	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung
58	Sulawesi Barat	Balai POM di Mamuju	Balai	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar
59	Sulawesi Selatan	Balai Besar POM di Makassar	Balai Besar	Kota Makassar	Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, dan Kota Pare-Pare
60	Sulawesi Selatan	Balai POM di Palopo	Balai	Kota Palopo	Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Enrekang
61	Sulawesi Tengah	Balai POM di Palu	Balai	Kota Palu	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara
62	Sulawesi Tengah	Loka POM di Kabupaten Banggai	Loka	Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Banggai Laut
63	Sulawesi Tenggara	Balai POM di Kendari	Balai	Kota Kendari	Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan,

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
					Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan
64	Sulawesi Tenggara	Balai POM di Bau-Bau	Balai	Kota Bau-Bau	Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi
65	Sulawesi Utara	Balai Besar POM di Manado	Balai Besar	Kota Manado	Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
66	Sulawesi Utara	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Loka	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
67	Gorontalo	Balai Besar POM di Gorontalo	Balai Besar	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato
68	Maluku	Balai POM di Ambon	Balai	Kota Ambon	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Buru Selatan
69	Maluku	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Loka	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya
70	Maluku Utara	Balai POM di Sofifi	Balai	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur,

No	Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah Kerja
					Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu
71	Maluku Utara	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Loka	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara
72	Papua Barat	Balai POM di Manokwari	Balai	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak
73	Papua Barat Daya	Loka POM di Kabupaten Sorong	Loka	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Raja Ampat
74	Papua	Balai Besar POM di Jayapura	Balai Besar	Kota Jayapura	Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Lanny Jaya
75	Papua Tengah	Loka POM di Kabupaten Mimika	Loka	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Puncak Jaya
76	Papua Selatan	Loka POM di Kabupaten Merauke	Loka	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR